



Implementasi Nilai Pancasila dalam Praktik Non-Publik

Desty Surya Khairunnisak¹, Dwi Nur Kholifah², Moh. Faizin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: ✉ 06020525033@student.uinsa.ac.id

ABSTRACT

Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi dan pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam tataran pemerintahan maupun masyarakat. Makalah ini menitikberatkan pada implementasi nilai-nilai Pancasila di luar sektor publik, meliputi bidang sosial, pendidikan non-formal, ekonomi, dan kehidupan beragama. Nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan ketuhanan memiliki relevansi yang besar dalam menciptakan harmoni sosial. Dalam dunia pendidikan non-formal, misalnya, nilai disiplin dan gotong royong menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Pada sektor ekonomi, prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan usaha kecil menengah. Di bidang keagamaan, nilai toleransi dan persaudaraan antarumat beragama memperkuat persatuan bangsa. Makalah ini juga menguraikan tantangan implementasi nilai Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi, seperti arus budaya asing, kapitalisme digital, serta menurunnya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat modern. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan tetap mempertahankan identitas dan jati diri bangsa.

Kata Kunci

Pancasila, Implementasi, Sektor Non-Publik, Nilai-Nilai, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar dan visi utama dalam kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya berfungsi sebagai pedoman formal kenegaraan, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh warga negara. Karena itu, kedudukan serta fungsi Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia — baik sebagai jiwa, ideologi, maupun kesepakatan luhur yang menyatukan keberagaman masyarakat (Suwandi, 2002). Secara historis, perumusan Pancasila bermula dari pidato Muh. Yamin pada 29 Mei 1945, yang mengusulkan lima asas yaitu *peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial (keadilan sosial)*. (Kholid, 2021) Dari sinilah, nilai-nilai dasar Pancasila mulai dibentuk dan disepakati sebagai dasar negara yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks modern, khususnya di era

globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan besar. Perkembangan teknologi, industrialisasi, serta derasnya arus budaya asing telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. (Febian Ari, 2024). Perubahan ini dapat menimbulkan pergeseran nilai dan mengancam keharmonisan sosial apabila tidak diimbangi dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.

Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya setiap individu memahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan – baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila secara mendalam, masyarakat akan mampu memperkuat karakter, jati diri, dan kepribadian bangsa. (Suwandi, 2002)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yakni menelaah berbagai sumber tertulis untuk menjelaskan penerapan Pancasila diluar sektor publik, terutama dalam ranah sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis filosofis dan sosiologis normatif yakni menelaah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pemahaman penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diluar sektor public. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data yakni mengumpulkan refrensi dan literatur yang membahas penerapan Pancasila diluar sektor public, Analisa data dengan cara menelaah isi sumber untuk menemukan implementasi, tantangan serta dampak pada penerapan Pancasila, penarikan kesimpulan dengan menyusun hasil Analisa menjadi uraian sistematis sehingga menjadi bahasan yang dicari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai Pancasila dalam Praktik Non-Publik

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang menuntun seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Selama ini, pembahasan tentang Pancasila sering kali berhenti pada tingkat kebijakan publik – padahal nilai-nilainya justru hidup paling nyata di luar ranah pemerintahan. Dalam sektor sosial, pendidikan non-formal, dunia usaha, dan kehidupan keagamaan, Pancasila menemukan bentuk penerapannya yang sesungguhnya. Nilai-nilai tersebut mengatur bagaimana manusia bersosialisasi dengan sesamanya, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan, secara seimbang dan sopan

Berikut beberapa wujud penerapan Pancasila di luar sektor publik dapat dilihat melalui berbagai aspek, antara lain:

a. Pancasila Sebagai Ruang Praktik dalam Kehidupan Sosial

Ruang sosial merupakan arena utama bagi penerapan nilai-nilai Pancasila karena di sinilah interaksi antarmanusia berlangsung. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Menurut Aulia Nur Jannah dan Dinie Anggraeni Dewi (2021), penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial-budaya menjadi fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan berkarakter. Mereka menegaskan bahwa praktik sosial seperti saling menghormati, gotong royong, dan tolong-menolong adalah perwujudan nyata dari sila kedua (*Kemanusiaan yang adil dan beradab*) dan sila ketiga (*Persatuan Indonesia*). (Aulia Nur Jannah, 2021)

Tradisi gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial di berbagai daerah di Indonesia merupakan bukti bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Namun, arus globalisasi dan teknologi digital kini membawa tantangan baru. Pola hidup yang semakin individualistik, ketergantungan pada media sosial, serta menurunnya kepedulian sosial menandai pergeseran nilai yang perlu diwaspadai. Karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial perlu dilakukan melalui pendidikan karakter, kampanye digital, dan penguatan komunitas berbasis nilai kemanusiaan serta gotong royong. Dengan demikian, penerapan Pancasila di ranah sosial bukan hanya tentang menjaga keharmonisan, melainkan juga tentang membangun kesadaran kolektif bahwa kebersamaan dan solidaritas adalah kekuatan bangsa. Nilai-nilai ini menjadikan masyarakat Indonesia tidak sekadar hidup berdampingan, tetapi juga saling menguatkan dalam keragaman (Aulia Nur Jannah, 2021)

b. Pancasila Sebagai Laboratorium dalam Pendidikan Non-Formal

Selain lembaga pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan non-formal mencakup lembaga seperti kursus, pelatihan, pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan berbagai bentuk kegiatan sosial lainnya. Raudatus Syaadah dan rekan-rekannya (2022) menjelaskan bahwa pendidikan non-formal berfungsi sebagai pelengkap dan penguat pendidikan formal, dengan fleksibilitas yang memungkinkan penanaman nilai-nilai karakter secara lebih kontekstual.

Pesantren menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan non-formal menginternalisasi nilai Pancasila. Di lembaga ini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga disiplin, kemandirian, kerja sama, serta rasa

hormat kepada guru dan sesama santri. Nilai-nilai seperti empati dan tanggung jawab mencerminkan sila kedua dan sila kelima (*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*).

Begitu pula di lembaga pelatihan dan kursus, prinsip keadilan sosial diwujudkan dalam kesempatan belajar yang merata tanpa membedakan latar belakang ekonomi peserta. Hal ini sejalan dengan pandangan Siti Sa'adah dan Hendri (2023) yang menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat untuk membangun karakter sosial yang inklusif. (Raudatus Syaadah, 2022)

Dengan pendekatan yang lebih praktis, pendidikan non-formal juga bisa menjadi media efektif dalam menanamkan semangat nasionalisme dan solidaritas. Kegiatan seperti pramuka, pelatihan kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat bukan hanya membentuk keterampilan sosial, tetapi juga memperkuat kesadaran kebangsaan. Dalam konteks ini, pendidikan non-formal berfungsi sebagai "laboratorium nilai" tempat generasi muda belajar menghidupkan semangat gotong royong, tanggung jawab, dan kemanusiaan. (Siti Sa'adah, 2023)

c. Pancasila Sebagai Etika Bisnis dalam Dunia Usaha dan Ekonomi

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia usaha merupakan aspek penting yang sering terabaikan. Pancasila menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Dea Salsabila dan Ersi Sisdianto (2024) yang menyebutkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia bisnis dapat diwujudkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Dea Salsabila, 2024) Melalui CSR, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Misalnya, dengan memberdayakan masyarakat sekitar, membantu UMKM, atau memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Semua ini adalah bentuk nyata dari semangat *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Di era digital, penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi juga bisa dilihat pada tumbuhnya model bisnis berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat, seperti koperasi digital, e-commerce lokal, dan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Aliya Putri Setiowati dan rekan-rekannya (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai persatuan dan gotong royong, selama dikelola dengan prinsip keadilan dan kebersamaan (Alia Putri Setiowati, 2022).

Namun, perkembangan ekonomi global juga membawa risiko baru, seperti dominasi pasar internasional dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila harus dijadikan dasar etika bisnis agar pelaku ekonomi tidak terjebak pada praktik kapitalistik yang eksploitatif. Dunia usaha yang berlandaskan nilai Pancasila akan lebih humanis dan berkeadilan, menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional.

d. Pancasila Sebagai Spirit Toleransi dalam Kehidupan Beragama

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Dalam konteks ini, sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Nilai ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya menegaskan kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi juga menuntun setiap warga negara untuk saling menghormati perbedaan keyakinan.

Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dapat dilihat dari sikap toleransi antarumat beragama yang masih terjaga di banyak daerah. Misalnya, kerja sama lintas agama dalam menjaga keamanan tempat ibadah atau solidaritas masyarakat ketika membantu umat lain yang merayakan hari besar keagamaan. Penelitian yang dimuat dalam *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* (2024) menegaskan bahwa praktik toleransi semacam ini merupakan bentuk konkret dari penerapan sila kedua dan sila ketiga.

Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan berperan penting dalam membentuk kesadaran toleransi sejak dini. Melalui pengajaran nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan, generasi muda dapat memahami bahwa keberagaman merupakan kekuatan, bukan ancaman. Aliya Putri Setiowati dan rekan-rekannya (2022) juga menegaskan bahwa pendidikan agama yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan mampu memperkuat semangat persatuan di tengah perbedaan bangsa (Alia Putri Setiowati, 2022)

Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai jembatan moral yang mempersatukan berbagai keyakinan dan budaya. Ia menegaskan bahwa perbedaan iman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan fondasi bagi terciptanya harmoni sosial dan solidaritas kebangsaan.

Tantangan dan Dampak Implementasi Pancasila Dalam Praktik Non-Publik

Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, telah terbukti menjadi fondasi yang kokoh dalam mempersatukan keragaman dan menjaga keutuhan nasional. Namun, dalam dinamika global saat ini, penerapan nilai-nilainya menghadapi berbagai tantangan, terutama di luar sektor publik di mana kontrol negara tidak sekuat di ranah pemerintahan. Dunia yang semakin

terbuka, teknologi yang berkembang pesat, dan perubahan sosial-ekonomi yang drastis menimbulkan persoalan baru yang menuntut reinterpretasi terhadap makna dan praktik Pancasila di masa kini.

a. Tantangan dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Luar Sektor Publik

1. Tantangan dalam Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan risiko terhadap pelestarian nilai-nilai luhur bangsa. Pretty Brigita Puspa Hati (2024) menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan nilai Pancasila di era digital adalah degradasi moral dan menurunnya sensitivitas sosial akibat pola komunikasi yang serba instan (Brigita, 2024). Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Fenomena hoaks, ujaran kebencian, dan penyebaran fitnah menjadi masalah sosial yang nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih lemah dalam menginternalisasi sila kedua dan sila kelima, yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial.

Selain itu, menurut Widiastuti dan Dinie Anggraeni Dewi (2022), teknologi digital juga berpotensi memudahkan nilai gotong royong dan solidaritas, karena komunikasi virtual cenderung menggeser interaksi sosial langsung yang penuh empati (Widiastuti asti, 2022). Banyak masyarakat yang lebih sibuk membangun “identitas digital” ketimbang memperkuat nilai kemanusiaan di dunia nyata. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila. Setiap individu harus mampu memanfaatkan teknologi secara etis dan beradab, menjadikannya sarana untuk memperkuat persatuan, bukan menebar perpecahan. Pancasila dalam konteks teknologi digital harus diartikan sebagai kompas moral yang menuntun manusia agar bijak menggunakan pengetahuan untuk kemaslahatan bersama.

Tantangan lain dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ketika inovasi tidak dilandasi dengan kesadaran etis. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan algoritma sering mengutamakan efisiensi tanpa mengindahkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Akses teknologi yang tidak merata juga mendatangkan kesenjangan antara kelompok yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kelompok yang terus tertinggal. Jika hal ini terus berlanjut, maka ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi alat untuk memajukan kehidupan malah justru menciptakan ketidakadilan.

2. Tantangan Globalisasi dan Budaya Asing

Globalisasi telah menjadikan dunia tanpa batas, di mana arus informasi, modal, dan budaya bergerak bebas lintas negara. Namun, kebebasan ini tidak

selalu membawa dampak positif. Globalisasi menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin konsumtif dan individualistik, serta menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin lebar (Marzuki, 2025)

Masuknya budaya asing melalui media sosial, film, dan gaya hidup global juga berpotensi melemahkan identitas nasional. Arina Mufida (2023) mencatat bahwa pengaruh budaya barat sering kali membawa nilai-nilai yang tidak selaras dengan budaya Indonesia, seperti hedonisme, permisivisme, dan penurunan rasa hormat terhadap norma sosial (Mufida, 2023)

Fenomena ini dapat mereduksi makna Pancasila sebagai pedoman etika kehidupan berbangsa. (Marzuki, 2025). Ketika masyarakat lebih mengagungkan budaya luar tanpa proses seleksi nilai, maka esensi Pancasila sebagai jati diri bangsa mulai tergeser (Mufida, 2023). Oleh karena itu, perlu ada revitalisasi budaya yang memadukan semangat keterbukaan global dengan kekhasan nilai-nilai lokal. Misalnya, melalui promosi budaya nusantara, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, dan penggunaan media digital untuk memperkuat narasi kebangsaan.

Dengan demikian, globalisasi tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menegaskan kembali keunggulan nilai-nilai Pancasila di tengah arus budaya global. (Marzuki, 2025)

Semua orang dapat menggunakan teknologi secara bebas di era digital seperti sekarang, namun kebebasan tersebutlah yang dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti menerbar kebencian dan meretas informasi pribadi orang lain. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi agar tidak ada pihak yang dirugikan. (Marzuki, 2025).

Seperti halnya, globalisasi yang telah menjadi isu kontroversial yang menciptakan kesenjangan besar antar negara. Juga menimbulkan risiko bagi kehidupan manusia akibat globalisasi yang semakin kompleks, seperti konflik besar atau nuklir, kekuatan ekstrem yang tumbuh dalam masyarakat serta memunculkan terorisme (Estuningtyas)

3. Tantangan dalam Dunia Ekonomi

Tantangan berikutnya terletak pada bidang ekonomi. Dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme, orientasi keuntungan sering kali mengesampingkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ryzanada Sabil (2025) menyoroti fenomena neo-imperialisme ekonomi—yakni bentuk penjajahan modern di mana negara-negara maju menguasai perekonomian negara berkembang melalui investasi dan kontrol pasar global (Sabil, 2025)

Kondisi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap negara lain. Ketika sumber daya alam dan sistem produksi dikuasai oleh perusahaan multinasional, kedaulatan ekonomi bangsa terancam. Bahkan, kebijakan publik pun bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi asing. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menuntut *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (Sabil, 2025). Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi di dalam negeri juga menjadi persoalan serius. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok kaya dan miskin, mencerminkan belum meratanya penerapan prinsip keadilan sosial. Oleh sebab itu, ekonomi Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai sistem yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan, antara efisiensi dan solidaritas.

Penerapan etika bisnis berbasis Pancasila—yang menjunjung kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial—dapat menjadi solusi untuk mengembalikan nilai moral dalam dunia usaha. Dengan begitu, ekonomi nasional tidak hanya maju secara material, tetapi juga bermartabat secara sosial (Sabil, 2025)

Tantangan lainnya yakni utang luar negeri, utang luar negeri dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, tetapi terdapat ketentuan-ketentuan yang merugikan dalam pengambilan utang luar negeri, seperti suku bunga yang tinggi atau kebijakan pengalihan kekayaan sumber daya alam, dapat memperburuk ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada utang yang tidak terkontrol dari negara asing dapat mengakibatkan dampak politik yang merugikan kedaulatan ekonomi Indonesia

Selain dari tantangan diatas, Indonesia mendapatkan tantangan lain yakni penguasaan pasar oleh pasar Internasional, ketergantungan terhadap perusahaan multinasional mulai menguasai pasar Indonesia, baik di sektor industri, perdagangan, maupun distribusi, dapat merugikan usaha lokal dan menghalangi pertumbuhan industri domestik. Keberadaan perusahaan itu juga bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi, karena mayoritas keuntungan justru mengalir keluar negeri

Selain dari ketergantungan pada penguasaan pasar oleh pasar Internasional, Indonesia juga tengah mengalami tantangan yakni ketergantungan pada ekonomi digital, kehidupan ekonomi global yang kini didominasi oleh digitalisasi dan teknologi informasi, mengakibatkan ketergantungan pada teknologi luar, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai oleh negara-negara maju, sehingga berdampak pada kehilangan kemandirian dalam sektor digital. Ketergantungan pada platform yang dikelola oleh negara asing dapat mengancam ketahanan data dan informasi, serta mengurangi kontrol negara terhadap kebijakan ekonomi digital

Tantangan yang dialami Indonesia tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi tetapi juga telah memengaruhi aspek Pendidikan dan penelitian, neo-imperialisme semakin diperburuk dengan adanya kesimpangan pada kualitas sektor pendidikan dan penelitian. Kualitas pendidikan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah penelitian lokal membuat Indonesia semakin bergantung pada perpindahan teknologi dari negara luar. keadaan ini dapat semakin memperburuk kecenderungan teknologi dan ekonomi pada kelompok luar, dari kasus ini, dapat semakin menghalangi Indonesia untuk menciptakan perubahan dan kapasitas ekonomi yang independen (Sabil, 2025)

4. Tantangan dalam Ranah Sosial dan Isu Identitas

Selain tantangan dalam bidang IPTEK dan ekonomi, nilai-nilai Pancasila juga menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial akibat globalisasi dan modernisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir, gaya hidup, serta interaksi antarwarga negara. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan tenggang rasa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia mulai tergerus oleh sikap individualisme dan materialisme. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi penerapan Pancasila dalam membangun karakter dan solidaritas sosial masyarakat Indonesia.

1) Kapitalisme

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam mengelola modal dan sumber daya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi sepenuhnya digerakkan oleh mekanisme pasar, di mana harga serta distribusi barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran tanpa banyak campur tangan negara. Prinsip utama kapitalisme adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi serta kebebasan ekonomi individu dalam menjalankan kegiatan usaha. Meskipun kapitalisme dapat mendorong kemajuan ekonomi dan melahirkan inovasi, sistem ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini terjadi karena orientasi kapitalisme lebih menitikberatkan pada keuntungan pribadi dibandingkan kesejahteraan bersama. Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan keadilan sosial—yang menjadi inti dari Pancasila—sering kali terabaikan ketika kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan kolektif. Kapitalisme juga meningkatkan persaingan di ranah sosial antara individu dan kelompok. Kepemilikan materi, status ekonomi, dan pencapaian individu

merupakan faktor yang secara tidak langsung digunakan masyarakat untuk menilai suatu keberhasilan. Pola pikir seperti ini dapat menciptakan jarak sosial dan dapat mengurangi empati antar individu, karena hubungan yang dihasilkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi daripada kepentingan kemanusiaan. Selain itu, masalah identitas juga dipengaruhi oleh arus kapitalisme kontemporer, terutama ketika budaya konsumtif menjadi cara baru bagi individu untuk menunjukkan identitasnya. Kemampuan untuk membeli barang-barang yang dianggap prestisius sekarang lebih menentukan identitas seseorang daripada nilai moral atau kontribusi sosial. Kondisi ini menyebabkan kelompok dengan latar belakang kurang mampu dalam memenuhi standar tersebut merasa terasingkan, yang menyebabkan stigma dan diskriminasi sosial menjadi lebih kuat.

2) Komunisme

Komunisme adalah paham yang mengajarkan bahwa semua harta, alat produksi, dan sumber daya harus dimiliki bersama oleh negara atau masyarakat, bukan oleh individu. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang setara, tanpa perbedaan kelas antara orang kaya dan orang miskin. Dalam sistem ini, negara berperan besar dalam mengatur ekonomi, pekerjaan, dan pembagian hasil agar semua orang mendapatkan bagian yang sama. Namun, dalam praktiknya, komunisme sering kali menimbulkan masalah baru. Ketika semua hal diatur oleh negara, kebebasan individu menjadi terbatas. Orang tidak bisa bebas berusaha atau memiliki harta sendiri karena semuanya dianggap milik bersama. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi pasif, kurang berinovasi, dan tidak termotivasi untuk bekerja keras karena hasilnya akan dibagi rata.

3) Disintegrasi bangsa

Disintegrasi bangsa berarti terpecahnya persatuan dalam suatu negara karena hilangnya rasa kebersamaan dan semangat nasionalisme di antara masyarakatnya. Kondisi ini bisa terjadi ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat lebih mementingkan kepentingan daerah, suku, agama, atau golongan tertentu daripada kepentingan nasional. Akibatnya, rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia menjadi lemah. Penyebab disintegrasi bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat. Banyak orang lebih sibuk dengan urusan pribadi atau kelompoknya sendiri dan mulai kehilangan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar (*hoaks*), perbedaan pandangan politik, serta ketidakadilan sosial juga dapat memicu

perpecahan antarwarga negara. (alamsyah, 2024) Fenomena ini menandakan bahwa semangat *Persatuan Indonesia* (sila ketiga) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran kolektif. Ketika kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa, maka fondasi moral Pancasila melemah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya rekonsiliasi nilai kebangsaan melalui pendidikan politik yang beradab, media yang bertanggung jawab, dan dialog lintas komunitas yang menumbuhkan semangat persaudaraan.

b. Dampak dari Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Luar Sektor Publik

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi nilai-nilai Pancasila di sektor non-publik telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan terbukti berperan besar dalam membentuk perilaku sosial, karakter individu, dan kesadaran kebangsaan (Najicha)

1. Penguatan Solidaritas dan Kewarganegaraan Aktif

Implementasi Pancasila mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Sikap gotong royong, tolong-menolong, dan empati sosial menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Ulfatun Fatma Najicha (2023) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu membentuk kesadaran warga negara untuk hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama (Najicha). Ketika nilai-nilai ini diinternalisasi, masyarakat tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat kehidupan bersama. Sikap ini menciptakan *social cohesion* atau keterpaduan sosial yang menjadi fondasi utama stabilitas bangsa.

Di luar itu, cara masyarakat dalam menangani masalah sosial seperti bencana alam atau masalah ekonomi menunjukkan penguatan solidaritas. Warga sering kali bergerak secara mandiri untuk mengumpulkan bantuan, membuka dapur umum, atau bahkan menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah. Ini adalah jenis kepedulian yang menunjukkan bahwa penerapan Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, nilai kewarganegaraan aktif mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi tidak hanya dimaknai dengan berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, namun juga terlibat dalam kegiatan karang taruna, musyawarah lingkungan, dan mengawasi kebijakan yang memengaruhi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk berkontribusi dan menjaga harmoni sosial, potensi konflik dapat diminimalisasi karena persoalan dapat diselesaikan melalui semangat persatuan dan kesatuan.

2. Pembentukan Karakter Demokratis dan Berkeadaban

Pancasila juga berperan dalam membentuk karakter masyarakat yang demokratis dan beradab. Melalui pemahaman terhadap sila keempat (*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*), masyarakat diajak untuk menghargai perbedaan pendapat dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nilai ini sangat penting di tengah maraknya polarisasi opini di media sosial. Penerapan Pancasila dalam konteks digital menuntut masyarakat untuk berdialog secara santun, menghargai keberagaman pandangan, dan menolak ujaran kebencian. Dengan demikian, demokrasi yang dibangun tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial – berakar pada nilai moral dan etika bangsa.

Internalisasi Pancasila juga mendorong lahirnya budaya diskusi yang sehat. Masyarakat dilatih untuk mendengarkan sebelum menilai dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sehinggadapat mengedepankan akal ketika mengambil sebuah keputusan. Sikap menghargai dan saling menghormati dapat membantu mencegah adanya ujaran kebencian dan informasi yang memecah belah. Di kalangan generasi muda, nilai-nilai tersebut sangat membantu dalam mengembangkan kebiasaan berbicara secara terbuka tanpa menjatuhkan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang dibangun atas dasar Pancasila tidak hanya terbatas pada proses pemilihan umum atau proses politik semata, tetapi juga tercermin dalam cara berkomunikasi masyarakat sehari-hari.

3. Penguatan Karakter Ekonomi Berkeadilan

Dalam ranah ekonomi, implementasi Pancasila menghasilkan sistem yang lebih inklusif dan manusiawi. Nilai keadilan sosial mendorong pelaku usaha untuk menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi. Ketika perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan memberdayakan masyarakat sekitar, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial: muncul rasa saling percaya, loyalitas, dan solidaritas antarwarga.

Prinsip ekonomi Pancasila juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi, Pancasila memastikan bahwa pertumbuhan tidak menimbulkan ketimpangan sosial, melainkan membawa kesejahteraan bagi semua.

Selain itu, penerapan nilai kemanusiaan dalam ekonomi mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan etika, seperti melindungi hak pekerja, memberikan upah yang layak, dan menjaga lingkungan kerja. Praktik ini tidak hanya menghasilkan keuntungan jangka panjang, tetapi juga menjamin

bahwa aktivitas ekonomi tidak akan berdampak negatif pada kehidupan alam dan sosial. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi tidak hanya membahas kemajuan, tetapi juga membahas bagaimana kemajuan tersebut dapat memberikan manfaat yang adil, merata, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Terbentuknya kesadaran Moral dan Nasionalisme Baru

Dampak terbesar dari penerapan nilai-nilai Pancasila adalah terbentuknya kesadaran moral yang kuat di tengah masyarakat. Generasi muda, yang hidup dalam era globalisasi dan digitalisasi, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Namun, ketika pendidikan dan lingkungan sosial berhasil menanamkan semangat Pancasila, mereka akan tumbuh sebagai warga negara yang berintegritas, toleran, dan berjiwa kebangsaan.

Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan bangsa. Dengan kata lain, implementasi Pancasila tidak hanya membentuk warga negara yang taat hukum, tetapi juga manusia yang beretika dan beradab.

KESIMPULAN

Implementasi Pancasila di luar sektor publik mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, pendidikan non-formal, ekonomi, hingga kehidupan beragama. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga pedoman nyata dalam interaksi masyarakat. Dengan penerapan yang konsisten, Pancasila mampu menciptakan kerukunan, menumbuhkan rasa kemanusiaan, mewujudkan keadilan sosial, serta memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan pedoman dan tujuan dalam segala aspek masyarakat yang mengalami perkembangan. Semakin tumbuh dan berkembangnya zaman, nilai Pancasila mulai terancam oleh kemajuan, banyak sekali tantangan yang sudah ditemui diluar sektor publik, terutama dalam aspek teknologi, ekonomi dan sosial.

Sebagai landasan dan pedoman bangsa, nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh yang jelas terhadap masyarakat bersosialisasi, pengaruh dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam aspek kewarganegaraan dapat meningkatkan sikap gotong-royong masyarakat, toleransi, persatuan dan keadilan sosial

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Ketersediaan waktu luang, kesabaran, masukan untuk mengoreksi dan membuka wawasan kepada penulis sehingga membawa penulis pada penyelesaian artikel ini. Semoga segala ilmu dan pengorbanan waktu yang telah diberikan dan menjadi amal jariyah yang tak terputus

DAFTAR PUSTAKA

- Abiaz Fazel Maula Sandy, dkk. Pengaruh Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Jiwa Kewarganegaraan Gengerasi Muda Di Indonesia. Surakarta: Borneo Law Review
- Alamsyah Putra, dkk. Jurnal Dinamika dan Tantangan Pancasila di Masa Akan Datang (Studi Kasus di Dusun Vii Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara). Medan: Pusdikra Publishing, 2024/
- Asti Widiastuti, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Solusi Dari Tantangan Generasi Milenial. Bandung: Jurnal Kewarganegaraan, 2022
- Brigita Pretty Puspa Hati. Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dunia Modern. Jurnal embumian Pancasila, 2024
- Fajar Setyaning Dwi Putra, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Etika Kerja Di Industri: Perspektif Bahasa Indonesia Sebagai Medium Komunikasi. Jakarta: Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, 2024
- Jannah Aulia Nur & Dewi Dini Anggraeni. 2021. *Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat Abad-21*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 931-936.
- Kholid Damanhuri, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Karyawan di Perusahaan Manufaktur Alat Berat PT HTC, Bekasi: Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan, 2021
- Marzuki, dkk. Pancasila Dan Tantangan Di Era Digital. Sumatera: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2025
- Putri Novi Tria, dkk. Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi Di Era Globalisasi. Surakarta: Jurnal Gema Keadilan, 2022
- Retna Dwi Estuningtyas. Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. Jakarta.
- Sa'adah Siti & Hendri. 2023. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat Desa Karyawangi Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB). Vol. 3, No. 2: 180.

- Sabil Ryzanada,dkk. Implementasi Pancasila dalam Membangun Ekonomi Nasional yang Bebas dari Jeratan Imperialisme. Bogor: Student Scientific Creativity Journal, 2025
- Salsabila Dea & Ersi Sisdianto. 2024. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Program CSR Perusahaan untuk Keberlanjutan Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen (JIEM). Vol. 2, No. 11.
- Setiowati Aliya Putri, dkk. 2022. *Penerapan Pancasila Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 1.
- Syaadah Raudatus, dkk. 2022. *Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal*. PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 2: 125-131.
- Arina Mufida (2023, 18 Desember), Masuknya Budaya Asing ke Indonesia akibat Globalisasi Menjadi Suatu Ancaman Sekaligus Tantangan bagi Negara Indonesia, diakses pada 18 Desember 2023, dari <https://www.kompasiana.com/arina80940>